

**DEGRADASI SUARA PARTAI BULAN BINTANG PADA PEMILU
LEGISLATIF DI KOTA MEDAN TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Strata Satu (S1) Ilmu Syari'ah dan Hukum

OLEH :

ALI MUDDIN USMANA

23151002



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

1441 H / 2020

**DEGRADASI SUARA PARTAI BULAN BINTANG PADA PEMILU
LEGISLATIF DI KOTA MEDAN TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh :

ALI MUDDIN USMANA

NIM: 23151002

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA
NIP. 19591915 199703 2 001

Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 200801 1 007

Mengetahui:
Ketua Jurusan Siyasah Fakultas
Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Fatimah, MA
NIP. 19710320 1997033 2 003

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Degradasi Suara Partai Bulan Bintang Pada Pemilu Legislatif Di Kota Medan Tahun 2019, telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan, pada tanggal 19 Agustus 2020.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu syari'ah pada Jurusan Siyasah.

Medan, 09 September 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU

Ketua

Sekretaris

Fatimah S.Ag,MA
NIP. 19710320 199703 2 003

Zaid Al-Fauza, SH. MH
NIP.19880824 201503 1 004

Anggota-Anggota

Dr. Sahmiar Pulungan
NIP. 19591915 199703 2 001

Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA
NIP. 19791020 20090 1 1010

Irwansyah, SH.I, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 200801 1 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 1977 321 200901 1 008

IKHTISAR

Judul dari Skripsi ini adalah: Degradasi Suara Partai Bulan Bintang Pada Pemilu Legislatif Di Kota Medan Tahun 2019. Adapun latar belakang dalam masalah ini ialah Partai Bulan Bintang yang pada umumnya dikenal sebagai partai yang berasaskan Islam dan dibentuk oleh dari beberapa elemen-elemen ormas Islam pada tanggal 17 Juli 1998 kemudian dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 1998 tepat di halaman Masjid A-Azhar Kemayoran Baru Jakarta. Mengalami kegagalan dalam pemilu Legislatif karena tidak ada satupun yang menjadi anggota Legislatif di Kota Medan. Seharusnya PBB mempunyai peluang besar untuk menang dalam pemilu Legislatif, karena mayoritas agama di Kota Medan adalah Islam ditambah lagi dibentuknya PBB atas tekad ormas Islam yang Mengiginkan partai yang mampu memperjuangkan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan pengumpulan angket yang dibagikan di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah DPC PBB Kota Medan, DPW PBB Sumatera Utara, dan masyarakat Kota Medan.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah, penyebab degradasi suara Partai Politik Bulan Bintang tidak terlepas dari permasalahan internal partai itu sendiri seperti, Adanya konflik dalam tubuh Partai Bulan Bintang Kota Medan, tidak berjalanya proses kaderisasi, tidak mempunyai basis masa yang tetap, kurangnya aksi sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak diantara masyarakat yang tidak mengetahui apa itu tujuan dan visi, misi dari PBB, dan PBB tidak bersama Ijtima Ulama pada pilpres 2019 sehingga kurangnya responden masyarakat terhadap PBB, dan melemahnya mental para kader dan caleg dalam pemilu legislatif Kota Medan 2019.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang tidak bosan-bosanya memberikan rahmat dan nikmat kepada penulis. Baik nikmat kesehatan, kesempatan dan yang paling penting nikmatnya iman dan Islam. Sehingga dengan rahmat dan nikmat tersebut penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan yaitu penulisan skripsi ini. Dan tidak lupa juga shalawat dan salam kepada Baginda nabi Muhammad SAW yang telah dapat menegakkan kalimatul haq di permukaan bumi ini. Dalam rangka untuk menyelesaikan perkuliahan ini maka penulis harus dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **DEGRADASI SUARA PARTAI BULAN BINTANG PADA PEMILU LEGISLATIF DI KOTA MEDAN TAHUN 2019**

Melihat keterbatasan potensi penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini tentunya penulis sadar bahwa penulisan ini jauh dari kata baik atau tidak sempurna. Maka dari itu penulis berharap dari setiap pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini.

Dan tidak lupa juga dengan rasa hormat yang setulus-tulusnya, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Alm Ayah saya Ula dan mama saya, Nur Bani Pasaribu yang telah berjuang dan bersusah payah membesarkan dan mendidik saya, meyekolahkan saya hingga sampai tingkat perkuliahan terimakasih telah menjadi inspirasi, penyemangat dan motivasi kepadaku.

2. Saudara kandung saya, Melani Sariah sebagai kakak tertua saya, Tuty Juliani kakak no 2, Nur Romadoni kakak no 3, dan yang terakhir Siti Juhairoh adinda saya, yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis hingga sampai pada akhir perkuliahan.
3. Terimakasih juga kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus UIN Sumatera Utara.
4. Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Zulham, S.HI. M.Hum sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Terimakasih juga kepada pembimbing I saya, Bapak Dr. Dhiahuddin Tanjung, S.HI, MA serta Bapak Heri Firmansyah, MA sebagai pembimbing II yang telah membantu, memberikan arahan dan masukan selama penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih juga kepada Ketua jurusan siyasah Ibu Fatimah, MA dan sekretaris jurusan Bapak Zaid Alfauzah Marpaung, MH yang telah banyak membantu dalam hal perkuliahan hingga akhir dari perkuliahan ini.
7. Dedi Syahputera, Abdul Mukti, yang sudah saya anggap sebagai abang angkat, terimakasih atas pemberian motivasi dan Informasi terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Ketua DPW Sumatera Utara PBB Bapak Drs. H. Awaluddin Sibarani, SH, M.Si, Bapak Ketua DPC PBB Kota Medan H.

Damri Tambunan, S.HI, S.Pd.I, dan pengurus lainnya yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis.

9. Keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis tetap semangat dalam melakukan sesuatu.
10. Ihsan S.H, Dela Salvinia S.H, Tri Vany Maulida, M. Sadly Abdullah Manik, S.H, Lili Herlina Harahap, dan sahabat-sahabat lain yang sudah menyemangatin dan memberikan candaan konyol sehingga penulis tetap terhibur dan tetap semangat.
11. Rekan-rekan mahasiswa Siyasa.A stambuk 2015 dan kepada seluruh sahabat-sahabat Pesantren At-thoyyibah Pinang Lembang.

Sekian ucapan terimakasih yang sebanyak-banyak penulis sampaikan dan kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon ampun, akhir kalam mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Medan, 25 Juli 2020

Penulis

ALI MUDDIN USMANA

NIM. 23151002

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan masalah.....	11
E. Tujuan dan manfaat penelitian.....	12
F. Sistematika pembahasan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Partai Politik dan Menurut Pakar Politik	15
B. Pengertian Partai Politik Menurut Islam	17
C. Fungsi Partai Menurut Undang-Undang	24
D. Fungsi Partai Politik Dalam Islam	25
E. Terbentuknya Partai Politik Di Indonesia.....	27
F. Sejarah Berdirinya Partai Bulan Bintang	31
G. Partai Bulan Bintang Di Kota Medan	38
H. Hasil Penelitian Yang Relavan	45
I. Hipotesis Penelitian.....	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	47
B. Pendekatan penelitian	47
C. Lokasi dan Waktu penelitian	48
D. Populasi dan Sampel	49
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Analisis Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penyebab Degradasi Suara Partai Politik Bulan Bintang.....	54
B. Kendala yang dihadapi Partai Bulan Bintang dalam pemilihan legislatif tahun 2019	59
C. Respon warga Kota Medan terhadap eksistensi Partai Bulan Bintang dalam pemilihan legislatif tahun 2019.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

LAMPIRAN	
----------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam KBBI pengertian degradasi adalah penurunan, kemerosotan, kemunduran (tentang pangkat, mutu, moral, dan sebagainya). Istilah kata degradasi dalam partai politik dapat diartikan sebagai penurunan suara partai atau kemunduran mutu partai dalam bersaing merebutkan dan mempertahankan kekuasaan politik.

Partai politik merupakan suatu pembahasan yang tidak asing lagi untuk diperbincangkan, sebab partai politik merupakan bagian dari infrastruktur dalam negara.¹ Dibentuknya partai politik tidak lain untuk mengaplikasikan kekuasaan baik dalam membentuk kebijakan pemerintahan sehingga di bentuknya Partai politik tersebut tidak lain untuk mencapai kekuasaan dilembaga Eksekutif maupun Lembaga legislatif. dan fungsi dari partai politik di negara demokrasi adalah sebagai prasarana komunikasi, sosialisasi, penghimpun, rekrutmen dan sebagai prasarana pengatur konflik politik.

Dalam KBBI partai di artikan sebagai perkumpulan segolongan orang yang seasas, sehaluan, dan setujuan mewujudkan ideologi politik tertentu. Definisi serupa dikemukakan oleh Prof. Dr. Ramlan Surbakti, bahwa partai politik adalah

¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 11.

representation of ideas atau mencerminkan suatu deskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan dan karenanya hendak diperjuangkan.²

Secara istilah menurut pemahaman politik kontemporer, parpol adalah sebuah organisasi yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai nilai-nilai dan tujuan yang sama, yaitu merebut atau mempertahankan kekuasaan politik. Kemudian Syekh Taqiyudin An-Nabhani, ulama alumnus Al-Azhar, Mesir, melihat pengertian politik dari kata *siyasa*. Sementara Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, menyatakan dalam bukunya *An Nizhom hukmi fil islam*. dia berpendapat, makna dari *siyasa* ialah merupakan pengaturan urusan masyarakat, baik di dalam maupun di manca negara dengan hukum-hukum tertentu dan dilakukan secara pragmatis oleh para penguasa pemerintah, yang diawasi dan dikontrol oleh warga atau rakyat. Sedangkan An-Nabhani, berpendapat bahwa arti utama politik adalah *hukam sulthon, riayah, tatbiq ahkam*, serta koreksi dan kontrol rakyat.³

Prof. Dr. Miriam Budiarjo memandang arti politik berasal dari kata *politic*. Beliau menuliskan di dalam bukunya *pengantar ilmu politik* bahwa istilah politik merupakan bermacam kegiatan yang terdapat didalam sistem politik yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan saat melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁴

² M.D Riyan, *Political Quotient Meneladani Perilaku Politik Para Nabi* (Bandung: PT Karya Kita, 2002), hal. 125.

³ *Ibid.*, hal.22-24.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 403.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011. Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang parpol adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menetapkan fungsi partai politik, yaitu :

- a. Pendidikan partai politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
- e. Ekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- f. Tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan opini publik lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur.⁵

Disaat mengembangkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat maka eksistensi partai politik sangatlah penting didalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi, karena yang menjadi karakteristik dalam negara tersebut ialah partai dan pemilu.

⁵ Jimly As Shiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK II, 2006), hal. 115-116.

Agar mendapatkan kekuasaan di dalam pemerintahan maka eksistensi partai politik harus ditentukan dari keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum dengan memperoleh suara dari pendukung. Sebab jika partai politik gagal dalam pemilihan umum maka keberadaannya akan terancam untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan.

Sebagai penganut paham demokrasi tentunya negara Indonesia tidak terlepas dari peran penting yang dilakukan oleh partai politik. Tetapi dikarenakan pelembagaan partai politik Indonesia masih belum optimal dan memiliki kompleksitas permasalahan internal.⁶ Tidak semua partai politik di Indonesia mampu memberikan kontribusi secara komprehensif dan optimal terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Di Indonesia sudah banyak partai politik yang ikutserta dalam proses demokratisasi salah satunya yaitu Partai Bulan Bintang yang merupakan sebuah partai yang berasaskan Islam berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 yang dideklarasikan pada 26 Juli 1998 tepat di halaman baitullah Masjid A-azhar Kemayoran Baru, Jakarta. Yang mempunyai visi mewujudkan masyarakat yang Islami dan misi membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.⁷

⁶ Rahman Arifin, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional* (Surabaya: SIC Tahun 2002), hal. 21.

⁷ Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang, *Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang*, (Jakarta: DPP PBB, 2005), hal. 118.

Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan sudah lima (5) kali Partai Bulan Bintang memperlihatkan eksistensinya dalam pemilihan umum yaitu ditahun 1999 awal pertama PBB ikut dalam pemilihan umum pesta demokrasi PBB mampu mendapatkan 13 kursi tingkat DPR RI dengan jumlah suara sebanyak 2.049.708 (1,94%), pada pesta demokrasi pemilihan umum di tahun 2004 PBB mendapat 11 kursi di tingkat DPR RI dengan jumlah suara 2.970.487 (2.62%), pada pesta demokrasi di tahun 2009 PBB meraih suara dengan jumlah 1.864.752 (1,79%).⁸ Di tahun 2014 PBB mendapatkan suara sebanyak 1.825.750 (1,46%) dan pemilu terakhir di tahun 2019 suara PBB semakin menurun dengan memperoleh suara 1.099 atau sekitar (0,79%).⁹

melihat paparan diatas di tahun 1999-2004 suara PBB masih stabil dan masih meraih kursi diparlemen tingkat DPR RI walaupun suaranya belum pernah melampaui batas 3% sedangkan di tahun 2009 sampai 2019 suara PBB mengalami degradasi sehingga suara yang diperoleh belum juga melampaui batas 3%. Akibat degradasi tersebut eksistensi PBB melemah sehingga PBB gagal lolos *Parliamentary Threshold*.¹⁰

Melihat sejarah berdirinya PBB yang didirikan oleh elemen-elemen ormas Islam.¹¹ seharusnya PBB dapat *survive* dan mempunyai peluang besar untuk merebutkan kekuasaan apalagi di lingkungan masyarakat PBB dikenal sebagai

⁸ Dokumen KPU, Bab V Hasil Pemilu dari Tahun 1955-2009. Diakses di <http://kpu.go.id>.

⁹ Surat Keputusan KPU, Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014.

¹⁰ rekapitulasi KPU tentang Perolehan Suara Partai Politik Secara Nasional.

¹¹ Muza Kazhin dan Alfia Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan Analisis dan Prospek* (tk: Pustaka Hidayah, tt), hal.121.

partai penurus dari perjuangan masyumi. Tapi sayang kenyataannya tidaklah seperti yang di inginkan oleh sebagian kalangan masyarakat yang mendukung PBB.

Hal di atas serupa dengan nasib PBB di Kota Medan, disaat pemilihan umum anggota Legislatif tingkat Kabupaten pada tahun 2009 PBB mengalami kegagalan karena tidak kandidat dari PBB yang menjadi anggota DPRD Kota Medan. Pada saat itu PBB hanya mendapatkan suara sebanyak 29.125. sedangkan di tahun 2014 PBB berhasil menghantarkan satu kandidat menjadi anggota dewan dengan memperoleh suara 31.153. dan pada tahun 2019 PBB juga mengalami kegagalan dengan memperoleh jumlah suara 21.326.¹² Sehingga tidak ada yang menjadi anggota DPRD Kota Medan. Dilihat dari data yang ditemukan bahwasanya di tahun 2019 suara PBB mengalami degradasi atau kemerosotan.

Mengenai instabilitas suara yang diperoleh PBB. Maka penulis akan membahas kajian yang mengenai penyebab degradasi suara Partai Bulan Bintang pada pileg di Kota Medan tahun 2019 yang berfokus pada pelebagaan aspek internal dan aspek eksternal.

Pelebagaan partai dalam aspek pengelolaan organisasi internal partai merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan partai meraih suara dalam pemilu. Seperti yang dikemukakan oleh Firmanzah (2008), bahwa peran partai secara institusional sebagai pusat yang mengendalikan kemenangan dalam pemilu itu sendiri. Aspek organisasi partai politik merupakan ensitas yang penting untuk

¹² Hasil wawancara dengan ketua KAPU DPC PBB Kota Medan Bapak Dedi Syahputra, pada tanggal 16 Desember 2019.

merebut dan mempertahankan kekuasaan pada sebuah pemerintahan dan keberhasilan sebuah partai politik terletak bagaimana mekanisme internal partai tersebut.¹³

Kemampuan partai politik dalam mencapai fungsi dan tujuannya merupakan integrasi dari struktur organisasi, perilaku aktor dan kelompok dalam organisasi, serta proses di dalam partai politik tersebut. Apabila internal partai bermasalah, maka sangat kecil kemungkinan harapan partai untuk dapat mencapai fungsi dan tujuannya secara optimal.

Pelebagaan sangat penting agar sebuah partai dapat *survive* dalam kancah perpolitikan.¹⁴ Apabila partai sudah terlembaga maka partai akan memiliki daya tahan yang tangguh dan bisa menyuguhkan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya rakyat sehingga mendorong pembangunan demokrasi.

Pelebagaan partai akan menjadikan partai bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi yang ideal. Hanya partai politik yang kuat dan terinstitusionalisasi yang menjanjikan pembangunan demokrasi yang lebih baik.¹⁵ Pelebagaan partai juga berpengaruh terhadap terlembaganya sistem kepartaian yang melahirkan pola kompetisi partai politik yang stabil.

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 161.

¹⁴ Samuel P Huntington (1968), Pendapat dikutip oleh Akbar Tandjung, Dalam *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal.23.

¹⁵ S.P Huntington, *The Third Wave; Democratization in The Late Twentieth Century* (University of Oklahoma Press, 1993), hal. 12.

Sebagai pilar demokrasi, partai politik merupakan lembaga yang sangat penting untuk ditingkatkan derajat pelembagaannya agar terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Partai politik merupakan salah satu bentuk lembaga sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan dalam demokrasi,¹⁶ baik buruknya demokrasi terletak pada kualitas partai politik, partai yang terinstitusionalisasi dengan baik akan mampu menciptakan kemajuan demokrasi.¹⁷

Karenanya memperbaiki demokrasi tanpa meyentuh pembaharuan partai politik dan sistem kepartaian adalah pembaharuan yang tidak esensial.¹⁸ Sehingga sejatinya pada titik inilah pelembagaan partai politik menjadi penting dan urgens. Dalam studi kepartaian di Indonesia, partai Islam menjadi isu penting baru untuk dikaji. Kehadiran partai politik Islam tentu memberi warna tersendiri dalam catatan sejarah demokratisasi Indonesia. Salah satunya tentang bagaimana partai islam dengan semua dinamisanya mengelola internal partainya sehingga dapat terlembaga dengan baik. Masih terbatasnya penulisan terkait eksistensi Partai Bulan Bintang juga menjadi pendorong dilakukannya kajian penelitian ini dengan judul “Degradasi Suara Partai Bulan Bintang Pada Pemilu Legislatif di Kota Medan Tahun 2019”.

¹⁶ Jimly As Shiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, Tahun 2005), hal. 52.

¹⁷ Todd Landman, *Issues and Methods in comparative politics* (London and New York: Routledg, 2000), hal. 189.

¹⁸ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek Di Indonesia* (Yogyakarta: Institute For Democracy And Welfarism, 2011), hal.62.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi suara PBB yang berasaskan Islam dalam pemilihan umum Legislatif Kota Medan sehingga tidak ada satupun yang menjadi anggota Legislatif DPRD Kota Medan
2. Rendahnya minat masyarakat dalam pemilihan umum
3. Kurangnya wawasan masyarakat terhadap partai PBB
4. kurangnya sosialisasi partai terhadap masyarakat
5. tidak berjalannya kaderisasi partai

C. Pembatasan masalah

Supaya penulisan ini tidak lari dari pembahasan atau pokok permasalahan tentunya penulis akan memberikan batasan pada pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan, saluran kepada komunikan, tentang penyebab degradasi Partai Bulan Bintang yang berasaskan Islam.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, maka disini penulis merumuskan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa penyebab degradasi suara Partai Bulan Bintang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Partai Bulan Bintang Kota Medan dalam pileg tahun 2019?

3. Apa respon warga Kota Medan terhadap eksistensi Partai Bulan Bintang saat pileg tahun 2019?

E. Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Suapaya tahu apa penyebab degradasi Partai Bulan Bintang dalam pemilihan Legislatif tahun 2019.
- b. Supaya tahu apa saja hal-hal yang menjadi *problem* Partai Bulan Bintang saat menjalankan fungsinya sebagai partai politik Islam
- c. Untuk mengetahui bagaimana respon warga Kota Medan terhadap keberadaan PBB saat pileg di tahun 2019.

2. Manfaat dari penelitian

- a. dengan adanya penilitian ini penulis berharap dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneilti lain dan salah satu sumber Referensi bagi Akademi dalam melakakun penelitian selanjutnya.
- b. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar masyarakat atau pembaca lebih mengenal apa itu PBB dan mengetahui apa penyebab deradasi suara PBB pada pileg 2019 di Kota Medan.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sokongan pemikiran yang berguna terkhusus bagi saya maupun bagi masyarakat untuk memotivasi diri agar terjun kedalam dunia politik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

C. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai: Pengertian Partai Politik dan menurut Pakar Politik, Pengertian Partai Politik menurut Islam, Fungsi Partai menurut Undang-undang, Fungsi Partai Politik Dalam Islam, Terbentuknya Partai Politik di Indonesia, Sejarah berdirinya Partai Bulan Bintang, Partai Bulan Bintang di Kota Medan, Hasil penelitian yang relevan dan Hipotesis penelitian.

Bab III Metode penelitian Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengolahan data, serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian. Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai : Penyebab degradasi Partai Bulan Bintang, Kendala yang dihadapi Partai Bulan Bintang dalam pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Respon masyarakat Kota Medan Terhadap Eksistensi Partai Bulan Bintang dalam pemilihan legislatif tahun 2019.

Bab V Penutup. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Parpol Menurut Pakar Politik

Secara universal dikatakan bahwa partai politik ialah merupakan kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹⁹

Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.²⁰

Sementara Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *modern political parties*, mengemukakan definisi partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.²¹

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 404.

²⁰ Friedrich, Carl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Waltham, (Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967), hal. 419.

²¹ Sigmund Neumann, "Modern Political Parties" dalam *Comparative Politics: A Reader*, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963), hal. 352.

Roy C. Macridis, mengartikan partai politik ialah asosiasi yang mengaktifkan. Memobilisasi rakyat dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.²²

Pendapat Rusadi Kantaprawira, partai politik adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*), dan mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pertahanan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan berkuasa.²³

Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.²⁴

Dari pengertian para pakar sarjana mengenai partai politik diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa partai politik ialah suatu organisasi yang terbentuk atas tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu kedudukan dalam sebuah pemerintahan. Sehingga timbulnya partai politik ini merupakan hal yang harus

²² Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan* (Jakarta; Kemitraan, 2008), hal. 7.

²³ *Ibid*, hal. 8.

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 160-161.

dipaksakan, karena dengan adanya partai politik berarti seseorang mendapatkan kemudahan mencapai sebuah kedudukan dalam pemerintahan, dengan kata lain partai politik adalah alat untuk individu memperoleh dukungan dalam menduduki jabatan pemerintah.

B. PENGERTIAN PARTAI POLITIK MENURUT ISLAM

Dalam Islam dari sisi bahasa partai politik dikatakan sebagai *Al-Hizb* berarti *at-thaifah* atau kelompok.²⁵ Imam Ibnu Manzhur (w. 771 H) dalam kitabnya "*lisan al-Arab*",²⁶ menyatakan kalimat *Al-hizb* berarti "*jama'ah ah an nas*", atau perkumpulan manusia; bentuknya plural adalah *Al-Ahzab*. Setiap kaum yang menyatu hati dan perkejaan mereka, disebut sebagai *Al-Ahzab* kendati sebagian mereka tidak bertemu dengan sebagian lainnya. Dikatakan pula: *Al-Hizb* artinya sekelompok atau umat manusia.

Kata *Al-Hizb* juga terdapat dalam kalamullah dan sunnah. Untuk lebih memahami maknanya, dalam bahasan ini akan diutarakan pendapat para ahli tafsir:

1. Dalam (QS. Al-ma'idah [05]: 56)

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

²⁵ Muhammad Ar-Razi, *Mukhtar al-Shihhah*, (Cet. I, Beirut, Daar al-Kutub al-Arabi, thn 1979 M), Vol. I, hal. 56.

²⁶ Ibnu Manzhur, *Mukhtashar Tarikh ad-Dimasyqi*, (al-Maktabah as-Syamilah), Vol. I, hal. 299.

Artinya : dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.²⁷

Hizb dalam ayat tersebut artinya penolong (agama Allah). Orang-orang beriman adalah *hizbullah* (penolong agama Allah) *Al-Hizb* adalah segolongan dari umat manusia. *Hizb* artinya *thahifah* (kelompok). *Al-Ahzab* artinya kelompok yang berkumpul untuk memerangi para Nabi. Jika dikatakan *hazabahu al-amr* artinya ia ditimpa sebuah persoalan.²⁸

2. Dalam (QS. Hud [11]: 17)

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ
إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۗ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدُهُ ۗ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

Artinya : Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (*Al-Qur'an*) dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum *Al-Qur'an* itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?. mereka itu beriman kepada *Al-Qur'an*. dan Barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada *Al-Qur'an*, Maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya, karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap *Al-Qur'an*

²⁷ Kementerian Agama, *Al Qura'an dan terjemah* (bogor: Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007), hal. 117.

²⁸ Muhammad bin Ahmad Al Qurthubi, *Jami'li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)*, (Cet.III, Kairo: Daar Al-Kitab Al-Arabi, thn. 1387 H/1967 M), Vol. VI, hal.222-223.

*itu. Sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.*²⁹

Kalimat “*minal Al-Ahzab*”, “dan sekutu-sekutunya”, maknanya dari seluruh agama dan kepercayaan. Sa'id bin Jubair (w. 95 H) menyatakan, kalimat “dan sekutu-sekutunya”, yakni seluruh agama-agama. Alasannya karena mereka saling berkumpul dan menolong. Dikatakan pula, maknanya adalah kaum kafir Quraisy dan penolong-penolongnya.

Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya semisal surah Ar-Ra'd [13]: 36, *Maryam: 38, Al-Rum: 32, Al-Ahzab: 20, Al-Ahzab: 22, Fatir: 6, Sad: 11, Sad: 13, gafir: 5, khafir: 30, Al-Zukhruf: 65, Al-Mujadalah: 19.*

Dari paparan ayat-ayat diatas, nampak bahwa kata *hizb* memiliki beragam makna, seperti kelompok dari manusia, pemeluk berbagai agama seperti Yahudi dan Nasrani, kaum musyrikin, musuh kaum muslimin, kelompok yang berkumpul memerangi para Nabi dan lain sebagainya.

Dalam Islam sejarah lahirnya *Ahzaab* para ahli sejarah menyatakan bahwa awal lahirnya kelompok-kelompok dalam Islam dimulai sejak terbunuhnya Khalifah Ar-Rasyidin ketiga, Utsman bin Affan ra. Mereka menyatakan, bahwa pada saat itu lahir dua kelompok besar, yakni kelompok (*Hizb*) Utsman yang di

²⁹Kementrian Agama, *Al Qura'an dan terjemah* (bogor: Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007), hal. 223.

pimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ra serta kelompok Ali bin Abi Thalib ra Khalifah ar-rasyidin yang keempat.³⁰

Kemudian Zaman Kekuasaan Daulah-Daulah Islamiyah di waktu kekuasaan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan ra, umat Islam saat itu terbagi menjadi tiga kelompok:

Pertama: kelompok pendukung Bani Umayyah dari kalangan penduduk Syam dan selainnya dari kota-kota Islam, khususnya mesir. Kedua: Kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib ra, yang terkonsentrasi di Irak dan sedikit di Mesir. Mereka juga berpandangan tampuk kekhalifahan harus dipegang oleh Quraisy, dan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ra dan anak keturunannya lebih berhak ketimbang kaum muslimin yang lain.³¹ Ketiga: kelompok Khawarij yang merupakan musuh kedua kelompok diatas, yang telah mengeluarkan fatwa halalnya darah kedua kelompok itu untuk ditumpahkan. Menurut kelompok itu Khawarij, kedua kelompok diatas telah keluar dari agama. Disamping itu, mereka juga berpandangan, bahwa tampuk kekhilafahan merupakan hak bagi setiap muslim selama ia memenuhi syarat dan sanggup menunaikan amanah. Karenanya, menurut mereka bahwa tidak ada perbedaan antara kaum Quraisy dan lainnya.³²

Dilihat dari beberapa ketentuan *nash* dasar berdirinya partai politik Islam antara lain, dalam. (QS Ali ‘Imran[3]: 104).

³⁰ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Poilitik*, Cet. I (jakarta: Gozian Press, 2013), hal. 221.

³¹ *Ibid.*, hal. 224.

³² Hasan Hasan, *Tarikh al-Islam, Maktabah al-Nahdhah al-Msriyah*, Vol. I, Cet. V (Kairo:1964), hal. 376.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.³³

Dilihat dari makna ayat tersebut maka *Nash* tersebut merupakan perintah untuk membentuk jamaah atau kelompok. karena, lafal *umat* yang terdapat pada ayat ini dikatakan sesudah konteks *waltakum minkum* (hendaklah ada diantara kalian segolongan umat: jamaah atau kelompok) konteks *minkum* ini jugalah yang menentukan konotasi umat dalam ayat ini sebagai *dalalah tadhammadun*, yang berarti kelompok yang berasal dari tubuh umat.³⁴ Yang dikehendaki dalam ayat ini bukan umat secara keseluruhan (*dalalah muthabaqah*), tetapi sebagian orang dari umat, dengan kata lain kelompok (jamaah). Ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surah *Ali Imran* ayat 110, yang menyatakan umat islam adalah umat terbaik. Jika umat ini telah dinyatakan sebagai umat terbaik, berarti perintah pembentukan “umat” dalam ayat 104 adalah perintah yang berbeda, yakni perintah untuk membuat kelompok yang menyeruh kepada Islam (*al-khair*), *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Ketiga aktivitas tersebut mengharuskan kelompok tersebut berasaskan Islam. Islam menjadi sumber pemikiran, pemahaman, dan keyakinannya.

³³ Kementerian Agama, *Al Qura'an dan terjemah* (bogor: Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007), hal. 63.

³⁴ M.D Riyan, *Political Quotient Meneladani Perilaku Politik Para Nabi* (Bandung: PT Karya Kita, 2002), hal. 127.

Berdasarkan ketentuan *nash* diatas, bisa disimpulkan harus ada jamaah atau kelompok yang menyerukan kepada Islam, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Jamaah ini tidak mungkin ada jika tidak berasaskan Islam. Dalam hal ini, Islam dijadikan ideologi dan *platform* (visi dan misi) perjuangannya.³⁵

Syarat dan karakteristik partai politik Islam yaitu pertama, di tinjau dari konsep maupun metodenya, partai politik Islam harus memiliki kesadaran yang matang atau sempurna yang berkaitan dengan Islam. Kedua, ditinjau dari pemimpinya layak apa tidak dalam memimpin partai. Ketiga, pemimpin harus mengerti metode yang shaih saat mererutmen anggota. Kemudian yang terakhir harus memiliki kesadaran yang luas tentang seluruh perpolitikan dunia dan setiap insidennya dan manifestasi politiknya harus menonjol.³⁶

C. FUNGSI PARTAI MENURUT UNDANG-UNDANG

Dilihat dari Undang-Undang No 2 Tahun 2011 yang terdapat pada Pasal 11 tentang partai politik fungsi partai politik ialah:³⁷

Ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

³⁵ *Ibid.*, hal. 128.

³⁶ *Ibid.*, hal 129.

³⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Ayat (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

D. FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM ISLAM

Dalam Islam fungsi partai harus menjalankan Visi, misi dan sifat pendirian partai Islam. Dalam menjalankan Visinya partai Islam wajib berdasarkan kepada aqidah Islam, dan harus siap juga untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat.³⁸ Menghidupkan kembali nilai-nilai murni ajaran Islam. Dan misi parti Islam adalah meletakkan agenda pembinaan masyarakat Islam secara menyeluruh dalam sisi kehidupan mulai dari pembinaan moral, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik sesuai dengan kekuatan partai untuk bergerak dalam setiap bidang tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu pendukung-pendukung setia yang mau bekerja sama.

Untuk kebangkitan umat Imam Hasan Al-Banna memandang bahwa ada beberapa perihal yang harus di tempuh. Pertama, melakukan pembinaan terhadap umat muslim agar tetap istiqomah dan dapat meraih kembali keperibadian ummat

³⁸ M. Fakhri, *Multi Partai Menuju Kehidupan Islam: Studi Kritis Standarisasi Partai-Partai Islam* (Jakarta: Taghyir Press, 2000) hal. 110.

yang telah dirusak oleh budaya barat. Melakukan pendidikan mental terhadap jiwa, akal dan peribadi secara baik dan benar agar sanggup menakhlukkan segala keraguan, ujian dan cobaan syahwat, supaya tidak loyo melewati rintangan, memiliki pemikiran nilai-nilai Islam yang lurus, kesanggupan untuk berpikir kuat sehingga siap untuk melawan di saat perang pemikiran (*Ghazuwu Al-Fikr*) dan harus bisa berdakwah.³⁹

Kedua, menurut beliau menyiapkan generasi yang baik dengan cara membentuk keluarga yang Islami dengan membentuk pasangan rumah tangga yang berdasarkan dasar agama yang kuat agar dapat membenahi kehancuran masyarakat yang sedang terjadi dengan generasi yang lebih baik.

Ketiga, menghidupkan kembali nilai-nilai Islami ditengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan syariat supaya mampu megaplikasikan tugasnya untuk berpartisipasi dalam memunculkan generasi muslim yang akan menjadi landasan bagi tegaknya agama Islam. Keempat, mengembalikan kejayaan Islam menuju tonggaknya syariat Allah di muka bumi.

Tujuannya partai politik Islam ialah “untuk menegakkan kedaulatan Allah dimuka bumi dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup didunia ini”. Tokoh-tokoh partai akan dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertawa”. Yaitu orang-orang yang ikhlas berjuang untuk menegakkan kalimah Allah dan mencari keridhaan-Nya. Orang-orang yang

³⁹ Hasan Al-Banna, *Majmu'ah Rasail al Imam al Shahid al Banna*, (Beirut: Dar al Qalam, t.t.) hal.81.

bemiat mengeksploitasi Islam untuk mencari kekuasaan kedunian yang bersifat sementara, tidak diterima menjadi pengurus.⁴⁰

E. TERBENTUKNYA PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Awal terbentuknya partai politik adalah dinegara-negara eropa barat. Pada, akhir dasawarsa 18-an seperti prancis, inggris bersamaan dengan adanya gagasan bahwa rakyatlah yang dapat menentukan proses dalam politik. Pada mulanya peran partai hanya dipokuskan pada kelompok-kelompok elit pada parlemen yang hanya bersifat untuk mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan para raja. Namun saat melebarnya hak pilih, maka kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (kadang-kadang dinamakan *causus party*) karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik, yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung (*link*) antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak lain.⁴¹

Di Indonesia kehadiran partai politik terjadi sesudah gugurnya pemerintahan Belanda. Runtuhnya pemerintahan tersebut memberikan peluang dan kesempatan

⁴⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumni Indonesia dan Partai Jarna'at al-Islarni Pakistan)* (Jakarta: Paramadina, 1999). Cet ke-1. hal. 90.

⁴¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 1.

kepada masyarakat untuk membuat suatu kelompok atau organisasi atau partai politik. Sebelum Indonesia Merdeka cikal-bakal timbulnya partai politik sudah ada. Lahirnya partai politik semasa penjajahan dikarenakan adanya pergerakan yang menginginkan kebebasan untuk menuntut adanya kemerdekaan.⁴²

Selain adanya dorongan iklim demokrasi yang dikasihkan oleh pemerintahan Belanda, munculnya partai politik di Indonesia tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagaimana disebutkan oleh John Furnival⁴³ bahwa masyarakat atau hindia belanda ketika itu merupakan masyarakat yang plural, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. Hanya saja, sambung furnifal, diantara mereka itu tidak pernah bertemu didalam suatu unit politik.

Mula-mula munculnya partai politik di Indonesia ialah lahirnya perkumpulan kaum terpelajar atau Budi Utomo, perkumpulan ini merupakan bentuk dari studie club, perkumpulan sosial ekonomi, dan organisasi pendidikan.⁴⁴ Kemudian selesai Budi Utomo lahir maka timbullah organisasi yaitu Serekat Islam dan *indiche partij* yang dikatakan sebagai partai politik pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1914 di Semarang muncul organisasi yang didirikan oleh belanda yaitu *Indische Social Democratische Vereeniging* (ISDV). Selain itu juga lahir Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia, partai Indonesia dan lain-lain.

⁴² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 60.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ G.J. Wollhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Djakarta: Timus Mas NV., 1955), hal. 54.

Muhammadiyah mengikrarkan diri bukan sebagai partai politik walaupun ada kaitannya dengan partai politik islam. Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan tujuan utama adalah untuk mengembalikan umat Islam kepada sumber Al-Qur'an dan hadist. Disamping menggugah umat Islam untuk berjuang dan beramal melalui organisasi ini.⁴⁵

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 Partai Politik mengalami kevakuman dalam menjalankan fungsinya. Kondisi ini disebabkan karena pemerintahan Jepang pada masa itu tidak mengizinkan partai politik untuk melaksanakan aktivitas politik. Pada saat itu pemerintah jepang lebih memfokuskan diri dalam mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan mengeksploitasi rakyat Indonesia untuk kerja paksa atau yang lebih dikenal dengan romusa. Pada mula Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 maka dimulailah babak baru bagi bangsa Indonesia merdeka untuk merumuskan cita-cita dan negara. Dalam rangka merumuskan dasar negara terjadi perdebatan yang sangat sengit antara partai politik-politik yang ada. Hal ini disebabkan karena tajamnya perbedaan ideologi dari masing-masing partai politik yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Demikianlah asal mula terbentuknya partai politik Indonesia.

⁴⁵M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 19-20.

F. SEJARAH BERDIRINYA PARTAI BULAN BINTANG

Sejak awal 1990 an, pemerintah orde baru sangat membutuhkan dukungan umat Islam sehingga pemerintah orde baru mendekati Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk menjalin kerjasama, termasuk yang didekatitin adalah mantan tokoh dari aktivis Masyumi di DDII. Pada kesempatan ini keikutsertaan mereka dalam politik dapat dikatan sebagai kebangkitan kembali bagi Masyumi dengan sebutan neon masyumi Tentunya hal tersebut sangat menguntungkan bagi tokoh dan aktivis Masyumi yang bernaung di DDII. Sehingga DDII andil bersama 15 organisasi dalam membidani pembentukan Badan Koodinsasi Umat Islam atau BKUI pada tanggal 28 April 1998. Dengan berdirinya BKUI tersebut, maka parah tokoh memulai perubahan untuk membangun partai politik Islam. Tapi langkah tersebut terkendala berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu sehingga pemerintah tidak mengijinkan.⁴⁶ Walaupun demikian antusias anggota BKUI tidak goyang dan mereka tetap semangat untuk mendirikan kembali partai Islam.

Dengan adanya BKUI mereka berharap BKUI dapat menjadi wadah seperti Majelis Islam Ala Indonesia yang berhasil melakukan Kongres Umat Islam Indonesia I pada waktu sebelum kemerdekaan. Dan dengan adanya BKUI mereka juga berharap potensi umat Islam searah dengan tujuanya, pertama melakukan kerja sama antara organisasi atau lembaga Islam tingkat nasional, untuk memperkokoh ukhuwah dan kebersamaan. Kedua, untuk mewakili Umat Islam

⁴⁶ Jhon L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern* (Bandung: Mijan, 2001) Cet. I, hal. 8.

Indonesia secara *Kaffah* dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan dakwah.⁴⁷

Sedangkan menurut Yusril Ihza Mahendra, pada 28 April 1998 sejak BKUI berdiri, telah dilakukan perintisan untuk mendirikan partai-parti Islam. Menurutnya ormas Islam yang tergabung di dalam BKUI adalah Ikatan Candikiawan Muslim, DDII, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Sarekat Islam, Forum Ukhuwah Islamiyah, Persatuan Umat Islam, Persatuan tarbiyah Islamiyah, Al-Irsyad, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, Forum Silaturahmi Ulama Habib dan Tokoh Masyarakat, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, Pelajar Islam Indonesia, Keluarga Besar PII, GPI beserta Keluarga Besar GPI, Bakomubim, As-Syafi'iyah, Pesantren Hidayatullah, Pesantren At-Taqwah, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Ittihadul Mubalilghim, Himpunan Mahasiswa Islam, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Ikatan Keluarga Muslim Indonesia (IKMI), Wanita Islam, Koordinat Mantan Lemba Dakwah Kampus, dan Forum Komunikasi Generasi Muda Islam.⁴⁸ Meski sudah ada niat, pendirian parpol yang berlandaskan Islam itupun akhirnya mentok oleh adanya larangan peraturan perundangan yang berlaku saat itu.

Dalam proses perintisannya, terjadilah diskusi tentang visi, misi, dan anggota-anggota partai. Akhirnya, tercapailah kesepakatan oleh semua anggota BKUI akan

⁴⁷ Bambang Setyo, *Sejarah Kebangkitan Dan Kiprah Partai Bulan Bintang* (Jakarta: DPP PBB, 2005), hal. 24.

⁴⁸ Musa Khazim dan Alfian Hamzah, *5 Partai Dalam Timbangan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), Cet. I, hal. 106.

berdirinya partai Islam dengan nama PBB pada 17 Juli 1998. Dan dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 1998 di halaman masjid agung Al-Azhar yang dibacakan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku ketua umum terpilih. Sedangkan Anwar Harjono pada saat itu sebagai sesepuh partai menyampaikan kepada seluruh pendengar bahwa partai ini secara aspiratif mencerminkan visi ke Islaman, kebangsaan, dan kegenerasian, partai ini juga berwawasan politik yang demokratis. PBB yang didirikan dengan dilandasi niat membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 serta prinsip bahwa Islam adalah rahmat seluruh alam.⁴⁹

Penggunaan Bulan Bintang sebagai simbol dimaksudkan untuk menggambarkan kesinambungan historis perjuangan Islam sejak berabad-abad lampau, sejak kaum muslimin tumbuh dan berkembang di masyarakat kita, diteruskan dengan berdirinya kesultanan-kesultanan Muslim, perjuangan melawan penjajah hingga mencapai kemerdekaan pada 1945 dan dilanjutkan sebagai simbol perjuangan politik umat Islam sampai sekarang ini. Partai Masyumi yang dulu diikrarkan sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik umat Islam di Indonesia pun menggunakan simbol Bulan Bintang.⁵⁰

Pada masa lalu sejumlah ormas Islam menjadi pendukung anggota istimewa partai politik Islam Masyumi dengan belajar dari pengalaman, maka duduknya seseorang dalam PBB bersifat perorangan dan bukan organisasi. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri kaitanya dengan organisasi dakwah dan ormas

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Bambang Setyo, *Sejarah Kebangkitan Dan Kiprah Partai Bulan Bintang* (Jakarta: DPP PBB, 2005), hal. 24.

yang menjadi induk masing-masing. Karena itu tidak mengherankan kalau dalam deretan penandatanganan naskah deklarasi tercatat tokoh-tokoh dengan berbagai latar belakang organisasi dakwah dan ormas Islam.⁵¹

Sambil melakukan Konsolidasi, pada tanggal 1 Oktober 1998 PBB menyampaikan resolusi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan kepada Badan Pekerja MPR, yang isinya antara lain tentang asas partai politik dan organisasi kemasyarakatan (pencabutan asas tunggal). Begitu sidang istimewa MPR 1998 mencabut ketetapan tentang asas tunggal, maka pada 16 November 1998 PBB mencabut asas Pancasila dari asas partai (Pasal 3 Anggaran Dasar) dan merubah pasal 3 Anggaran Dasar menjadi Partai beraqidah dan berasas Islam.⁵²

Asas Islam bagi PBB berarti partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Islam sebagai Agama yang disisi Allah SWT yang bertujuan untuk mengeluarkan umat dari zaman yang jahiliah menuju zaman yang terang berderang. Ajaran Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi, hukum, dan pandangan hidup dalam arti sesungguhnya. Bagi warga Bulan Bintang cahaya iman akan memancarkan *ukhuwah islamiyah* dan menyuburkan silaturahmi dalam berkehidupan masyarakat.⁵³

PBB berusaha mengembangkan bentuk oposisi Islam dari konsep *ama>r ma'ruf na>hi munkar*. Atas dasar ini, kebijakan umum oposisi partai adalah

⁵¹ *Ibid.*, hal. 28-29.

⁵² *Ibid.*, hal. 33.

⁵³ Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang, *Tafsir Asas Partai Bulan Bintang* (Jakarta: DPP PBB, 2005), hal. 74-75.

menentang semua yang *munkar* dan tentunya mendukung yang *ma'ruf*, dari pihak manapun datangnya, karena kebatilan itu tetap batil dan kebenaran itu tetap benar, bagaimana bentuknya pada masa dan zaman apapun peristiwanya.⁵⁴

Umat Islam sebagai mayoritas bangsa memikul beban dan tanggung jawab yang besar dalam memajukan bangsa Indonesia. Karena itulah PBB bertekad untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara terhadap kekuatan-kekuatan mana saja yang bermaksud merusak dan menghancurkannya. Usaha tersebut adalah bagian dari perjuangan keagamaan, karena bagi Warga Bulan Bintang antara ke-Islaman dan kebangsaan bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi sebuah satu kesatuan yang integral.

Secara tegas Visi PBB adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang Islami. Sedangkan misi partai adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.⁵⁵

PBB berdasar Islam, artinya PBB berpedoman seutuhnya pada nilai-nilai Islam. Karena itu seluruh aspek perjuangan dengan sikap, ucapan, dan perilaku segenap fungsionaris dan kader partai harus berlandaskan dan berpedoman pada

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 96.

⁵⁵ Hasil Mukhtamar II Partai Bulan Bintang, *Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang* (Jakarta: DPP PBB, 2005), hal. 118.

Islam yang prinsip-prinsip ajarannya cukup jelas, baik Al-Quran maupun Al-Hadist.⁵⁶

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBB merupakan aturan dasar berjalanya suatu organisasi yang terdiri dari asas, tujuan, lambang, serta aturan lainnya yang mengatur tentang partai tersebut. AD/ART partai dibuat dan disepakati dalam forum tertinggi yaitu muktamar yang melibatkan seluruh anggota atau utusan dari jumlah anggota diseluruh Indonesia.

AD PBB pada bab III tentang sifat dan tujuan pasal 5 disebut bahwa partai politik bersifat mandiri dan aktif melaksanakan *ama>r ma'ruf* dan *na>hi munkar*, maknanya partai ini didirikan bukan hanya bertujuan memperoleh kekuasaan tetapi juga mempunyai peran dakwah yaitu mengajak atau membangun masyarakat yang sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam.

G. PARTAI BULAN BINTANG DI KOTA MEDAN

Sudah 5 kali PBB mengikuti pemilihan umum di mulai dari tahun 1999 sampai 2019 sehingga dapat dikatakan PBB sudah memiliki pengalaman yang banyak dalam pemilihan umum. Parta ini bersifat mandiri dan aktif melaksanakan *al-amru bil-ma'rufi wa naha anil-munkar* dengan cara bijaksana, santun dan mengedepankan keteladanan. Serta Partai politik ini berfungsi sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan perjuangan politik bagi anggota masyarakat.

Kemudian dibentuknya PBB ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita NKRI sebagaimana yang telah tertuang di dalam UUD 1945. tujuan utama berdirinya

⁵⁶ Hasil Muktamar II, *Tafsir Asas*, hal. 76.

PBB ialah untuk tonggaknya syari'at Islam ditengah-tengah kehidupan baik kehidupan individu maupun sosial.

Dengan Pengalaman yang luas tentunya PBB dapat belajar kalau kepiawaian merupakan kebutuhan untuk mejalankan roda organisasi dalam menghadapi, menjaga-jaga, dan menangani segala perihal yang akan terjadi di masa yang akan datang.

PBB juga menerapkan struktur harus sama antara pusat dan daerah sehingga pengurus partai ditingkat daerah khususnya di Kota Medan mempunyai watak yang sama dengan pengurus pusat. Begitu juga dengan program-program kerja PBB. Adapun program kerja PBB terdiri dari:

1. Program internal partai. Adapun program tersebut seperti:
 - a. Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi.⁵⁷
 - 1) Melakukan reorientasi terhadap visi misi partai bagi jajaran keluarga besar Bulan Bintang secara nasional, melalui Orientasi Kepengurusan Partai.
 - 2) Melakukan konsolidasi organisasi sampai ditingkat yang paling bawah.
 - 3) Membentuk dan meningkatkan pemberdayaan badan-badan struktural partai untuk memperluas basis massa dan dukungan terhadap partai. Antara lain dengan membentuk Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - b. Dakwah dan Pembinaan Akhlakul karimah
 - 1) Melakukan kajian-kajian keislaman di setiap tingkatan kepengurusan partai.
 - 2) Menyusun konsep dan metode dakwah yang efektif dan melaksanakannya secara sistematis terprogram.
 - 3) Memelihara dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah dengan sebanyak-banyaknya potensi, subyek dan obyek dakwah.
 - 4) Membangun silaturahmi dengan ormas Islam untuk memperkuat basis partai, khususnya ormas pendukung berdirinya partai.
 - c. Pemberdayaan Ekonomi Anggota
 - 1) Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua kader partai untuk mengakses pengembangan usaha.

⁵⁷ Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang, *Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang*, (Jakarta: DPP PBB, 2005), hal. 120.

- 2) Membangun pusat informasi dan komunikasi usaha bagi pengusaha kader partai.
 - 3) Menciptakan lapangan kerja dan usaha produktif.
 - 4) Mendorong terbentuknya lembaga permodalan bagi pengembangan usaha kader partai.⁵⁸
- d. Pemberdayaan Generasi Muda
- Memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi muda untuk memimpin partai dan menjadi pejabat publik dari partai.
- 1) Mendukung sepenuhnya usaha-usaha Pemuda Bulan Bintang dan memberdayakan generasi muda serta memperluas dukungan partai dari kalangan muda dan pemilih pemula.
 - 2) Regenerasi kepemimpinan partai secara konsisten dan terus-menerus.
 - 3) Mengadakan pelatihan keterampilan berbasis teknologi informasi.
- e. Pemberdayaan Perempuan
- 1) Pembinaan dan pengembangan potensi perempuan secara maksimal dalam wadah khusus, Melalui penugasan dan berbagai aktifitas partai.
 - 2) Melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat.
 - 3) Memberikan kesempatan yang luas bagi kader perempuan (muslimat) untuk berperan lebih besar dalam kiprah partai sesuai dengan syariat Islam.⁵⁹
- f. Pembinaan dan Pengembangan Profesi
- 1) Melakukan *up-grading* dan pelatihan terhadap kader partai yang mengemban amanah sebagai pejabat publik.
 - 2) Melakukan rekrutmen terhadap para akademisi dan profesional untuk berkiprah dalam partai.
 - 3) Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesi dalam bentuk forum kajian, pemberian beasiswa dan penempatan tugas.
2. Program eksternal, yaitu:
- a. Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi
 - 1) Merumuskan konsep sistem pertahanan dan keamanan.
 - 2) Mendorong peningkatan kualitas profesionalitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
 - 3) Memperjuangkan peningkatan sarana, prasarana dan teknologi pertahanan keamanan serta kesejahteraan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
 - b. Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara
 - 1) Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang berwibawa, kuat, bersih dan terhindar dari KKN.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 21.

⁵⁹ *Ibid.*

- 2) Memperjuangkan berkembangnya budaya politik yang sehat dan demokratis dengan melakukan transformasi nilai-nilai- Islam.
 - 3) Memperjuang terlaksananya syariat Islam dalam skala lokal yang diakomodie dalam bentuk Perda.
 - 4) Meperjuangkan kemudahan sertifikasi tanah khususnya tahah wakaf dan hibah.
- c. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, kelautan, dan prikanan
- 1) Memperjuangkan program pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan sebagai basis strategi pengembangan ekonomi nasionl.
 - 2) Mendorong dan memantapkan pola ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
 - 3) Memperjuangkan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan petani dan nelayan.
 - 4) Meningkatkan optimalisasi sumber daya alam serta teknologi tepat guna untuk mengembangkan produktifitas ekonomi nasional.⁶⁰
- d. Hukum dan Perundang-undangan, HAM dan Keamanan
- 1) Memperjuangkan transformasi nilai-nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keamanan nasional melalui minat bela negara, semangat nasionalisme dan wawasan nusantara.
- e. Perhubungan, telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat
- 1) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan sebagai salah satu urat nadi kehidupan masyarakat.
 - 2) Memperjuangkan fasilitas perumahan bagi rakyat kecil dan menata pemukiman kumuh dengan pendekatan persuasif.⁶¹
- f. Pendidikan, Pemuda, Olaragah, Pariwisata, Seni dan Budaya
- 1) Mendorong peningkatan kualitas lemabaga pendidikan Islam dan pesantren terutama dalam mengembangkan model pendidikan terpadu yang berwawasan imtak dan imtek.
 - 2) Ikut serta dalam mengembangkan pariwisata, seni dan budaya yang bernafaskan Islam.
 - 3) Melakukan pembinaan generasi muda dengan model pendidikan dan pelatihan di berbagai profesi.
- g. Perdagangan, perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN
- 1) Mendorong terciptanya kerjasama internasional yang saling menguntungkan dalam bidang perdagangan.
 - 2) Memperjuangkan iklim investasi yang kondusif.
 - 3) Mendorong pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip-prinsip.
- h. Energi, Sumber Daya Mineral, Riset Teknologi dan Lingkungan Hidup

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 24.

⁶¹ *Ibid.*

- 1) Memperjuangkan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dengan basis pelestarian.
 - 2) Memacu pertumbuhan lembaga-lembaga riset, khususnya dunia pendidikan dan umumnya organisasi kemasyarakatan.
 - 3) Menciptakan dan membangun lingkungan hidup yang harmoni, teratur, tertib, sehat dan bersih.
- i. Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan
- 1) Membendung paham-paham keagamaan yang berkembang di masyarakat serta bertentangan dengan tuntunan Rasulullah.
 - 2) Memperjuangkan suatu sistem jaminan sosial nasional bagi fakir miskin, anak-anak terlantar jompo.
 - 3) Mendorong penguatan peranan perempuan dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam.
- j. Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi⁶²
- 1) Mendorong peningkatan program-program kependudukan yang terencana untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.
 - 2) Memperjuangkan jaminan nasional perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya fakir miskin.
 - 3) Memberikan kemudahan pelayanan dan proses administrasi serta perizinan bagi tenaga kerja Indonesia.
 - 4) Penyempurnaan program transmigrasi berbasis ekonomi yang berkesinambungan.
- k. Keuangan, Perbankan, dan lembaga Keuangan Bukan Bank
- 1) Memperjuangkan penyusunan peraturan perundang-undangan perbankan syariah dan lembaga keuangan bukannya bank yang berdasarkan prinsip syariah.
 - 2) Memperjuangkan penggunaan mata uang emas dan perak sebagai salah satu alat tukar dalam perdagangan dalam negeri.⁶³

Dengan adanya program tersebut maka PBB harus siap dalam mengembangkan segala potensi yang ada supaya dapat menyesuaikan diri dengan siklus kehidupan masyarakat. Agar programnya terus-menerus dapat diperbaharui sesuai dengan informasi yang didapat dari lingkungan masyarakat.⁶⁴

Dari program-program yang sudah dibahas sebelumnya penulis dapat menggambarkan bahwa, jika DPC PBB dapat merealisasikan program tersebut

⁶² *Ibid.*, hal. 125.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 380.

maka PBB akan mampu bersaing dan merebut kursi dalam pemilihan umum Legislatif di Kota Medan. Saat ini DPC PBB Kota Medan belum berhasil sepenuhnya menjalankan program partai dikarenakan banyak dari program-program tersebut belum terealisasi. Sehingga dampak yang terjadi pada PBB Kota Medan adalah masyarakat kurang bersimpati.

Padahal Kota Medan merupakan kota yang beragam agama dan bermayoritaskan Islam. Hal tersebut dilihat dari tempat beribadah yang ada di Kota Medan seperti Masjid/Langgar/Musholla berjumlah 1.759 bangunan, gereja 594 bangunan, vihara 185, dan kuil sebanyak 18 bangunan.⁶⁵

Seharusnya ini menjadi suatu pembelajaran bagi pengurus PBB agar supaya tidak bertele-tele dalam menjalankan program partai. Seperti yang dikatakan H. Damri Tambunan, S.HI, S.Pd.I selaku ketua DPC PBB Kota Medan yang baru ia menyampaikan “merosotnya suara partai merupakan kegagalan kami sebagai pengurus dalam menyetir kapal sehingga penurunan suara yang terjadi di tahun 2019 menjadi suatu pembelajaran bagi kami untuk kedepan agar lebih berhati-hati dan berjuang sepenuhnya untuk menarik simpati masyarakat dengan menjalankan program partai dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan tujuan visi, dan misi partai supaya tidak kecolongan dari partai-partai umum”.⁶⁶

⁶⁵ Sumber: Bagian Tata Pemerintah diolah dalam buku BPS kota Medan, hal. 90.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan ketua DPC PBB Kota Medan H. Damri Tambunan, S.HI, S.Pd.I, pada tanggal 16 Januari 2020.

H. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini mengenai Degradasi Suara PBB Pada Pemilu Legislatif di Kota Medan Tahun 2019 berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Yang pertama adalah penelitian dari Rizki Habibullah yang berjudul “EKSISTENSI PARTAI BULAN BINTANG (Studi Pada Dewan Pimpinan Wilayah PBB Propinsi Lampung)”

Yang kedua adalah penelitian dari Erdiansyah yang berjudul “KOMUNIKASI POLITIK” (Studi Tentang Dakwah Partai Politik Bulan Bintang).

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang diteliti dan masih perlu diuji kebenarannya, melalui penelitian dan data yang akan dikumpulkan dari penelitian tersebut. Hipotesis dalam penelitian ini adalah “hilangnya citra politik di masyarakat sehingga terjadinya degradasi suara Partai Bulan Bintang dalam pemilihan umum Legislatif Kota Medan tahun 2019”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Didalam suatu penelitian tentunya seorang penulis harus menggunakan metode penelitian agar penulisan terarah sehingga mencapai hasil yang optimal. Maka dari itu adapun metode penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan apa adanya yang terjadi dilapangan sehingga dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya pelebagaan PBB terutama di bagian pelebagaan Internal maupun eksternal partai.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yang pertama pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang terkait mengenai fungsi partai politik, kedua pendekatan studi kasus agar dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya pelebagaan aspek internal dan eksternal PBB, ketiga pendekatan historis dengan pendekatan ini penulis akan menganalisa sejarah berdirinya PBB dan awal PBB ikutserta dalam pemilihan umum sekaligus

memperkirakan apa yang akan terjadi dengan PBB di masa yang akan mendatang.⁶⁷

Menegenai pendekatan yang penulis sebutkan diatas ada beberpa yang menjadi alasan penulis untuk menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut. Pertama, pendekatan normatif alasan penulis menggunakan pendekatan ini ingin melihat PBB sesuai apa tidak dalam menjalankan fungsinya seperti yang tertuang didalam Undang-Undang. Kedua, alasan penulis menggunakan pendekatan studi kasus adalah karena penulis menganggap bahwa penelitaian yang berkaitan dengan pelebagaan aspek internal dan eksternal PBB yang berasaskan Islam merupakan kajian hal yang menarik untuk dibahas karena penulis merasakan ada yang ganjal dalam pelebagaan tersebut.

3. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini di DPC PBB Kota Medan yang beralamat di Jl. Denai No. 237A, Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20227. Dan Warga Kota Medan Kec. Medan Perjuangan, Kel. Sei Hilir I. kemudian masa penelitian dilakukan pada saat bulan Desember 2019 sampai Februari 2020.

4. Populasi dan Sampel

Arti dari populasi ialah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel diartikan sebagai sebagian dari populasi tersebut. Berdasarkan data BPS Kota Medan luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Medan sebagai berikut:

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.93.

LUAS WILAYAH KOTA MEDAN BERDASARKAN 21 KECAMATAN

Tabel I

NO	Nama kecamatan	Luas area (Km)	Persentase
1	Medan Tuntungan	20,68	7,80
2	Medan Johor	14,58	5,50
3	Medan Amplas	11,19	4,22
4	Medan Denai	9,05	3,41
5	Medan Area	5,52	2,08
6	Medan Kota	5,27	1,99
7	Medan maimun	2,98	1,12
8	Medan Petisah	6,82	2,57
9	Medan Selayang	12,81	4,83
10	Medan Helvetia	13,16	4,96
11	Medan Baru	5,84	2,20
12	Medan Deli	20,84	7,86
13	Medan Timur	7,76	2,93
14	Medan Barat	5,33	2,01
15	Medan Labuhan	36,67	13,83
16	Medan Belawan	26,25	9,90
17	Medan Sunggal	15,44	5,82
19	Medan Tembung	7,99	3,01
20	Medan Perjuangan	4,09	1,54
21	Medan Marelan	23,82	8,99
	Kota Medan	265,10	100,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintah diolah dalam buku BPS Kota Medan, 2018.

Data Penduduk Kota Medan berdasarkan 21 Kecamatan⁶⁸**Tabel II**

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Medan Tuntungan	43.369	44.570	87.939
2	Medan Johor	67.053	69.016	136.069
3	Medan Amplas	63.858	65.465	129.323
4	Medan Denai	73.109	74.872	147.981
5	Medan Area	49.391	50.602	99.993
6	Medan Kota	37.122	38.031	75.153
7	Medan Maimun	20.296	20.796	41.092
8	Medan Polonia	28.379	29.122	57.501
9	Medan Baru	20.228	20.735	40.963
10	Medan Selayang	54.192	55.734	109.926
11	Medan Sunggal	57.881	59.308	117.189
12	Medan Helvetia	75.983	78.006	153.989
13	Medan Petisah	31.604	32.388	63.992
14	Medan Barat	36.265	37.159	73.424
15	Medan Timur	55.551	56.931	112.482
16	Medan Perjuangan	47.832	49.016	96.484
17	Medan Tembung	68.556	70.328	138.884
18	Medan Deli	93.464	95.343	188.807
19	Medan Labuhan	59.834	61.027	120.861
20	Medan Marelan	85.368	87.088	172.456

⁶⁸ <http://medankota.bps.go.id>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.

21	Medan Belawan	49.067	50.206	99.273
	Kota Medan	1.091.937	1.118.687	2.264.145

Sumber: BPS Kota Medan, data penduduk desember 2018.

Melihat luasnya Kota Medan dan banyaknya jumlah penduduk Kota Medan maka peneliti memilih Kecamatan Medan Perjuangan, yang jumlah populasinya 96.484. Dan yang menjadi sampel peneliti di, Kelurahan Sei Kera Hilir I dan II yang berjumlah 200 penduduk, dikarenakan keterbatasan waktu yang diperlukan penulis untuk melakukan penelitain. Selanjutnya subyek penelitian ini pengurus, pejabat atau pimpinan cabang maupun wilayah Partai Bulan Bintang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pertama, dengan melakukan cara observasi untuk melakukan pengamatan bagaimana pelebagaan partai baik dari segi internal maupun eksternal kemudian penyebab terjadinya degradasi suara PBB Kota Medan. Kedua, dengan cara menggunakan studi pustaka, dengan cara ini peneliti dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan PBB melalui jurnal, buku, surat kabar dan lainnya. Ketiga dengan cara wawancara yang mendalam dan bersipat terbuka, dengan cara ini maka peneliti mendapatkan informasi yang berhubungan dengan PBB baik dibagian pelebagaan Internal maupun eksternal dan penyebab terjadinya degradasi suara PBB pada Pileg 2019 di Kota Medan. Kemudian yang terakhir dilakukan dengan penyebaran angket, dengan cara ini peneliti dapat mengetahui bagaimana responden masyarakat Kota Medan terhadap Eksistensi PBB.

6. Analisis Data

Studi ini mengambil totalitas dari karakter atau unit yang diteliti, yakni mengenai PBB yang berfokus pada pelebagaan aspek internal partai dan responden masyarakat Kota Medan terhadap PBB. Supaya dapat mengetahui pelebagaan aspek internal PBB dan responden masyarakat terhadap Partai Bulan Bintang dengan menjadikan elit-elit, anggota dan kader sebagai informan utama. Dari kedalaman analisisnya, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai subjek yang diteliti. Berdasarkan metode yang digunakan, yakni metode kualitatif, maka informasi didapatkan langsung dari informan-informan yang berkompeten dalam bidangnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PENYEBAB DEGRADASI SUARA PARTAI POLITIK BULAN BINTANG

Tentunya banyak faktor yang menyebabkan suara Partai Politik Bulan Bintang mengalami degradasi menjelang pada masa pemilu. Terkhusus pada masa pemilu Legislatif Kota Medan tahun 2019. dan disini peneliti menemukan apa saja yang menjadi penyebab degradasi suara PBB yaitu :

1. Terjadinya konflik internal dalam tubuh Partai Bulan Bintang Kota Medan

Terjadinya konflik tersebut pada saat pasca menjelang pileg 2019 dikarenakan adanya kecemburuan sosial dan miskomunikasi sesama pengurus sehingga konflik tersebut menggambarkan adanya daulisme dalam satu atap. Dengan adanya konflik dalam satu atap tersebut maka kefokuskan dalam menjalankan partai berkurang, dan berdampak negatif terhadap persiapan pemilu maupun pileg 2019.⁶⁹

2. Tidak berjalannya proses kaderisasi

Proses kegiatan kaderisasi sangatlah penting untuk dilakukan dalam organisasi atau kepartaian, karena sejatinya partai sangatlah membutuhkan kader yang militan. Selama ini PBB minim kader karena proses kaderisasi maupun

⁶⁹ Hasil wawancara dengan ketua KAPU DPC PBB Kota Medan Bapak Dedi Syahputra, pada tanggal 16 Desember 2019.

rekrutmen tidak berjalan baik sehingga tidak ada kader yang memiliki potensi yang matang untuk menjadi caleg.

3. Partai Bulan Bintang tidak memiliki masa yang tetap

Walaupun PBB didirikan oleh 22 ormas Islam dan dikatakan sebagai perjuangan penerus masyumi tapi realitanya sampai sekarang PBB tidak memiliki basis masa yang tetap sehingga ini yang menjadi penghambat di setiap langkah pergerakan PBB dan akibatnya setiap menjelang pemilu perolehan suara tidak stabil.

4. Kurangnya antusias masyarakat terhadap politik sehingga memilih untuk golput.

Dari temuan yang diperoleh antusias masyarakat sudah berkurang terhadap politik sehingga citra politik sudah jelek dimata masyarakat. Hal ini di akibatkan banyaknya janji-janji yang tidak terealisasi oleh para kandidat yang telah duduk di kursi Legislatif maupun Eksekutif, masyarakat menilai mereka hanya mementingkan partai dan perut mereka saja semua partai sama di mata masyarakat ditambah lagi dengan marak-maraknya korupsi yang dilakukan para anggota Legislatif maupun Eksekutif. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk golput. Melihat angka golput yang begitu banyak tentunya ini sangat berpengaruh terhadap partai politik terutama bagi PBB yang tidak memiliki masa yang tetap.

5. Rendahnya minat masyarakat terhadap Partai Bulan Bintang

Dari penemuan yang penulis dapatkan terjadinya degradasi suara PBB pada pemilu umum Legislatif Kota Medan tidak terlepas dari hasil keputusan Rapat Koordinasi Nasional bahwa PBB siap untuk mendukung pasangan calon presiden 01 yaitu Jokowi dan wakilnya padahal sebelum dilakukannya Rakornas M.S. Kaban sebagai Ketua Majelis Syuro PBB sudah mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Sandi dan mematuhi rekomendasi Itima Ulama II begitu juga dengan beberapa kader PBB. dan pada akhirnya dilakukannya rakornas tersebut masyarakat kecewa terhadap hasilnya sehingga masyarakat tidak simpatisan lagi terhadap PBB. mengingat lagi bahwa perkataan prof. Yusril Ihja Mahendra yang selama ini memberikan kritikan-kritikan pedas terhadap kepemimpinan Jokowi 2014-2019.

Seperti yang dinyatakan Ketua DPC PBB Kota Medan di awal masa pemilu banyak sebenarnya peminat partai Bulan Bintang bahkan ada yang dari partai-partai luar mau bergabung dan mungkin ini disebabkan oleh ketokohan Ketua Pusat Prof. Yusril Ihja Mahendra. Dan setelah di perivikasi caleg-calegnya ternyata ada yang diterima ada yang tidak khusus Medan anggota DPR yang ditetapkan masing-masing dapil berkompetisi dengan caleg-caleg dengan partai lain mereka bekerja keras memang ada sedikit pengaruh diantara caleg pendukung dan masyarakat simpatisan tentang pilpres kemaren. Karena ketua umum sudah memutuskan pilihan ke 01 padahal hampir semua caleg dan beberapa kader PBB sudah berharap agar PBB itu ke 02 untuk menaikkan suara di 2019. Tapi ternyata ini pengaruhnya. kalau secara partai kita wajib tunduk kepada aturan partai kalau

ketum kita ke 01 kita ke 01. Tapi masyarakat dibawah menilai beberapa indikasi sehingga mereka banyak yang beralih. Di awal 2019 pencalekan semua masyarakat yang simpatisan dan beberapa pendukung seperti jamaah pengajian banyak yang menyatakan siap mendukung PBB di Tahun 2019 Ternyata di akhir masa-masa kampanye ternyata ketum pusat memutuskan ke 01 tapi caleg tetap ada yang riak-riak sampai memundurkan diri ada yang sampai tidak bermain ada yang membiarkan namanya tidak pernah disentuh kebawah tapi itu hanya sebagian kecil saja.⁷⁰

Sementara pernyataan Ketua DPW PBB Sumatera Utara berbeda, Ketua DPW menyatakan “merosotnya suara PBB tidak sepenuhnya disebabkan beralihnya PBB ke 01 akan tetapi dan bukan juga dikarenakan ketua pusat menjadi kuasa hukum 01. Yang menjadi degradasi pada masa itu melemahnya mental para kader dan caleg dalam bertarung sehingga mesin partai tidak jalan. Buktinya saja di beberapa kabupaten seperti paluta yang dulunya Partai Bulan Bintang tidak pernah mendapati 1 fraksi kini pada tahun 2019 berhasil mendapati 3 kursi 1 fraksi. Paluta itu sangat kental dengan relegius ke Islamannya tetapi disana bisa mendapati 3 kursi 1 praksi begitu juga di Labuhanbatu, Batu bara, Langkat yang sangat kental dengan 02 tetapi Partai Bulan Bintang juga bisa bertahan artinya kegagalan itu bukan di karenakan 01 dan 02 akan tetapi kegagalan itu ada di mesin partai”.⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara dengan ketua DPC PBB Kota Medan H. Damri Tambunan, S.HI, S.Pd.I, pada tanggal 16 Januari 2020.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ketua DPW PBB Sumatera Utara Drs. H. Awaluddin Sibarani, SH, M.Si, pada tanggal 16 Januari 2020.

B. Kendala yang dihadapi Partai Bulan Bintang dalam pemilihan legislatif tahun 2019

Agenda-agenda PBB untuk menghadapi pemilu 2019 tidak berjalan lancar hal ini disebabkan oleh pendanaan partai. PBB mengalami kesulitan dalam membiayai dana operasional partai dan dana kampanye partai yang cenderung membengkak dengan drastis menjelang pemilu seperti kemarin. Banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh PBB untuk menjalankan strategi-strategi partai dalam meningkatkan elektabilitas mereka melalui program-program yang tentunya harus mengeluarkan biaya, seperti pengadaan atribut partai, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tapi, karena agenda politik setiap partai sangat banyak, maka pendanaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tidak cukup. Dan seiring dengan kian mahalnya biaya operasional dan kampanye pemilu. Sementara partai membutuhkan sumber pendanaan besar agar mesin politik dapat berfungsi secara maksimal dalam mendulang suara pemilih. Partai harus mencari cara agar eksistensi mereka tetap terjaga baik dalam masyarakat dan mampu meraih suara signifikan dalam pemilu. Realitasnya sumber penerimaan partai politik itu tak sekedar dari tiga sumber yang disebutkan diatas tetapi ada juga penerimaan dana

lain, salah satunya dari sumbangan pengusaha swasta yang berkepentingan, potongan gaji kader di Legislatif/Eksekutif lainnya.

Sementara di Kota Medan pada masa 2014 PBB hanya memperoleh 1 kursi. Artinya pada saat itu PBB hanya masi mengharapkan dana dari anggota yang duduk di Legislatif tersebut. Melihat hanya seorang saja yang menjadi perwakilan PBB yang menjadi Anggota DPRD di Kota Medan tentunya uang yang di peroleh tidaklah banyak dan tidak akan cukup untuk mendanain partai. Sementara badan usaha juga tidak ada yang bisa untuk di kelola.⁷²

C. Respon warga Kota Medan terhadap eksistensi Partai Bulan Bintang dalam pemilihan legisatif tahun 2019

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan ditemukan masih banyak masyarakat Kota Medan yang tidak mengetahui apa tujuan dan visi misi dari PBB. Namun sebagian masyarakat juga ada yang mengetahui tujuan dan visi misi PBB. Hasil itu penulis dapatkan setelah penulis menyebarkan angket kepada masyarakat berjumlah 200 responden. Dari hasil angket yang penulis sebarakan 40% masyarakat Kota Medan mengetahui apa itu Partai Bulan Bintang dan 60% tidak mengetahui apa itu PBB. Dari beberapa data yang di dapat penulis bisa menggambarkan bahwa sosialisasi PBB 100% belum berhasil sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengerti tentang eksistensi PBB.

⁷² Hasil wawancara dengan ketua KAPU DPC PBB Kota Medan Bapak Dedi Syahputra, pada tanggal 16 Desember 2019.

Dari 40% yang menegenetahui PBB. 20% di antaranya menjawab sejauh ini PBB kurang bersosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk bergabung dengan PBB. Bahkan ada juga yang mengkaitkan bahwa PBB pada masa Pilpres 2019 tidak mengikuti Ijtima Ulama padahal pada awalnya pandangan umat dengan penuh harap tertuju kepada PBB.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebagai salah satu ormas yang paling berperan mendirikan PBB yang dikatakan sebagai Walih Amanah, juga telah menyampaikan pandangan politiknya serta meminta PBB untuk mengikuti Ijtima Ulama dengan mendukung Prabowo Sandi. Itupun tidak dijadikan pertimbangan bagi YIM dalam mengambil keputusan. Justru yang terjadi pendapat internal ditentang dan diprotes, kemudian mengambil kompromi tanpa jalan melalui pertimbangan, seperti, mempertimbangkan Ijtima Ulama dan pendapat ormas Islam yang menjadi bagian dari berdirinya PBB serta, pendapat tokoh-tokoh Islam yang ada. Semua dikesampingkan kemudian mengambil keputusan yang sama sekali berbeda dan bahkan bersebrangan dengan *mainstream* umat. Dan ini juga merupakan pengaruh besar terhadap PBB sehingga banyak yang menyatakan PBB telah meninggalkan akar rumput.

Setelah dukungan arah politik PBB telah jelas kepada pasangan Jokowi dan Ma'ruf amin, maka kaum modernis yang secara ideologis memiliki cita politik yang sama dengan PBB mengajukan protes. Protes di media sosial berjibun bagai jamur di musim hujan. Mereka kecewa, dan mereka putus harapan akan kebangkitan politik Islam dengan mengandalkan partai yang katanya ideologi Islam, tapi bersebrangan dengan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas telah dipaparkan dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas tiga pertanyaan inti dan mendasar yang telah penulis lontarkan pada bab satu tepatnya pada bagian rumusan masalah skripsi ini. Kesimpulan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Penyebab degradasi suara Partai Politik Bulan Bintang tidak terlepas dari permasalahan internal seperti, Adanya konflik dalam tubuh Partai Bulan Bintang Kota Medan, tidak berjalannya proses kaderisasi, tidak mempunyai basis masa yang tetap, kurangnya aksi sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak diantara masyarakat yang tidak mengetahui apa itu tujuan dan visi, misi dari PBB, sehingga kurangnya responden masyarakat terhadap PBB, melemahnya mental para kader dan caleg dalam pemilu Legislatif Kota Medan 2019.
2. Kendala partai. pada pemilu 2019 di Kota Medan perjalanan PBB tidak berjalan lancar dalam merealisasikan suatu agenda yang telah di tentukan. Pada saat itu masalah yang dihadapi adalah masalah pendanaan sehingga sulit untuk memfasilitasi segala hal-hal yang ingin dibutuhkan contohnya membuat pengadaan kampanye dan atribut.
3. Responden masyarakat Kota Medan terhadap PBB pada pemilu 2019. Dari data yang penulis dapatkan maka dapat diambil kesimpulan masyarakat

Kota Medan kurang simpatisan terhadap PBB sebagian masyarakat menganggap partai yang berbasis Islam tersebut sama halnya dengan partai umum lainnya yang lebih mementingkan kepartainya ketimbang kepentingan umum sehingga masyarakat lebih memilih untuk golput. Sebagian masyarakat juga kurang responden terhadap PBB dikarenakan Partai Bulan Bintang tidak mengikuti Ijtimak Ulama dalam mengukung presiden.

B. Saran

Adapun saran untuk Partai Bulan Bintang dan para pembaca yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini PBB akan lebih bisa mengoptimalkan kaderisasi, karena kader merupakan ujung tombak keberhasilan dan kemajuan partai terutama dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah sebagai tujuan didirikannya partai ini.
2. Demi kemajuan PBB, hendaknya program dan kegiatan dilaksanakan langsung ke basis-basis pemilih atau basis masa. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mendekatkan partai ke tngah-tengah masyarakat serta memberikan pemahaman visi dan misi partai serta asas dasar perjuangan, agar perjuangan partai bisa dipahami jelas oleh masyarakat.
3. Disarankan kepada masyarakat Kota Medan agar lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan politik, dan jangan terbuai dengan narasi-narasi yang dihembuskan oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk mengintimidasi keburukan salah satu partai khususnya PBB sebelum ada penjelasan dari pengurus dari PBB itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

As Shiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi.

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK II, 2006.

As Shiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Arifin, Rahman. *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*.

Surabaya: SIC, 2002.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Esposito, Jhon L. *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modr*. Bandung: Mijan. 2001.

Fakhri, M. *Multi Partai Menuju Kehidupan IsIam: Studi Kritis Standarisasi Partai-Partai Islam*. Jakarta: Taghyir Press, 2000.

Friedrich, Carl. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Waltham, Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967.

G.J. Wollhoff. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Djakarta: Timus Mas NV, 1955.

Hamid, Ahmad Farhan. *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan, 2008.

Huntington, Samuel P. *The Golkar Way: Survival Partai Gokar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- Huntington Samuel P. *The Third Wave; Democratization in The Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press, 1993.
- Ibrahim, Dr, Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Khazim, Musa dan Alfian Hamzah. *5 Partai Dalam Timbangan*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Karim, M. Rusli. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Suru*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Landman, Todd. *Issues and Methods in comparative politics*. London and New York: Routledge, 2000.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik Teori dan Praktek Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy And Welfarism, 2011.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumni Indonesia dan Partai Jarna'at al-Islarni Pakistan)*. Jakarta: PARAMADINA, 1999.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia:Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Neumann, Sigmund. *Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader*, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter London: The Free Press of Glencoe, 1963.

Riyan, M.D. *Political Quotient Meneladani Perilaku Politik Para Nabi*. Bandung: PT Karya Kita, 2002.

Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Prees, 2013.

Setyo, Bambang. *Sejarah Kebangkitan Dan Kiprah Partai Bulan Bintang*. Jakarta: DPP PBB, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Bahan Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

B. Undang-Undang

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

C. Internet

<http://kpu.go.id>. *Bab V Hasil Pemilu dari Tahun 1955-2009*. Diunduh pada 10 Januari pukul 20:00 WIB.

<http://medankota.bps.go.id>. *Kota Medan Dalam Angka 2019*. Diunduh pada 15 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Dedi Syahputra. ketua KAPU DPC PBB Kota Medan Bapak. Desember 2019.

Hasil wawancara dengan Drs. H. Awaluddin Sibarani, SH, M.Si. Ketua DPW PBB Sumatera Utara. Januari 2020.

Hasil wawancara dengan H. Damri Tambunan, S.HI, S.Pd.I. ketua DPC PBB Kota Medan. Januari 2020.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Foto dengan Bapak Drs H. Awaluddin Sibarani, SH, M.Si selaku Ketua Wilayah DPW PBB Sumatera Utara dan Safwin Asrudi Rambe, S.Pd selaku Wakil Sekretaris Wilayah DPW PBB Sumatera Utara.



Foto bersama Bapak H. Damri Tambunan, S.HI, S.Pd.I. Selaku Ketua DPC Kota Medan.



Makan bersama dengan bapak Drs. Ali Amran Tanjung, SH. M.Hum DPP PBB



Menghadiri acara pernikahan kader PBB

Makan bersama dengan bapak Drs. Ali Amran Tanjung, SH. M.Hum DPP PBB.

